

STUDI PENGGUNAAN FASILITAS PENDIDIKAN DI KELURAHAN JELAMBAR, JAKARTA BARAT

Andreas Mihardja¹

¹⁾ Magister Teknik Perencanaan, Universitas Tarumanagara, Jakarta
E-mail: aanmihardja@gmail.com

ABSTRAK

Permukiman membutuhkan sarana pemenuhan fungsi permukiman yang terwujud dalam sarana atau fasilitas sosial. Fasilitas pendidikan yang merupakan salah satu fasilitas sosial yang penting. Kelurahan Jelambar di Jakarta Barat memiliki jumlah dan sebaran fasilitas pendidikan yang cukup lengkap namun tidak seluruh masyarakat Jelambar menggunakannya, namun terdapat warga dari luar Jelambar yang menggunakan fasilitas pendidikan tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan fasilitas pendidikan tersebut, mengapa seperti itu dan bagaimana preferensi penggunaannya. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi kondisi penyediaan fasilitas pendidikan di Jelambar dengan acuan SNI 03-1733-2004 dan Perda DKI no. 6 tahun 1999 yang kemudian mengidentifikasi pola penggunaan fasilitas pendidikan dan mengidentifikasi preferensi / faktor dominan alasan penggunaan fasilitas pendidikan di Jelambar. Variabel alasan penggunaan dirangkum dari penelitian terdahulu antara lain Kemudahan akses menuju sekolah, Ketersediaan transportasi publik, Kedekatan pencapaian dari tempat tinggal, Berada di wilayah Kelurahan yang sama dengan tempat tinggal, Kualitas fisik bangunan, Kualitas guru dan pengajaran, Ketersediaan fasilitas, Citra / Reputasi Sekolah, Basis agama sekolah, Kesamaan etnis/ ras antar siswa, Relasi keluarga/ tradisi keluarga, Biaya transportasi, Biaya sekolah, Negeri / Swasta. Metode yang digunakan adalah Kuantitatif Deskriptif, yang kemudian dikaitkan secara komprehensif agar diketahui apa alasan-alasan yang menyebabkan penggunaan fasilitas pendidikan seperti pada kondisi eksisting. Hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi penyediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar sudah sesuai dengan SNI dan Perda DKI. Dari sisi pola penggunaan, terdapat segregasi agama dan ras siswa pada sekolah tertentu, yaitu pengelompokan siswa beragama non muslim di sekolah berbasis agama – meski agama siswa tidak semuanya sesuai dengan basis agama sekolah tersebut dan siswa muslim didominasi di sekolah non agama. Serta terdapat segregasi tingkat ekonomi siswa dimana sekolah berbasis agama cenderung untuk kelas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sekolah non agama. Dari sisi jangkauan dan asal siswa, mayoritas siswa berasal dari jarak tempuh 0 – 2 Km dari fasilitas pendidikan yang digunakannya, sehingga cukup wajar. Adapun faktor dominan pengguna fasilitas pendidikan tersebut antara lain faktor Kualitas dan Pengajaran, disusul oleh Citra/ Reputasi Sekolah, Biaya SPP, Ketersediaan fasilitas, dan Kepemilikan Sekolah.

Kata Kunci: Penggunaan Fasilitas Pendidikan, Segregasi

1. PENDAHULUAN

Kota terbentuk dari berbagai elemen, salah satunya adalah permukiman. Suatu kawasan permukiman terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan

Menurut pasal 1(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987, tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Kepada Pemerintah, fasilitas sosial adalah ; fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, peribadatan, rekreasi/budaya, olahraga dan taman bermain, pemerintah & pelayanan umum serta pemakaman umum.

Salah satu fasilitas sosial yang penting adalah fasilitas pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang paling mendasar dari kebutuhan insan manusia untuk kelangsungan hidup dan masa depannya. Fasilitas Pendidikan ini harus ada di tiap-tiap wilayah di Perkotaan sebagai pelengkap kebutuhan dasar penduduk di wilayah tersebut.

Salah satu kawasan permukiman kota di Jakarta adalah wilayah Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Kelurahan Jelambar sendiri merupakan kawasan permukiman perkotaan yang cukup tertata. Fasilitas yang terdapat di Kelurahan Jelambar sudah terbilang lengkap dalam hal penyediaan berdasarkan jenisnya- terdapat sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan sarana olahraga dan rekreasi. Khusus untuk fasilitas pendidikan, di Jelambar sendiri terdapat sejumlah sekolah negeri dan swasta, serta sekolah berlandaskan agama. Tingkat sekolah yang ada mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. berdasarkan pengamatan awal terlihat bahwa sejumlah warga usia sekolah di Jelambar tidak menggunakan fasilitas pendidikan di wilayahnya, namun terdapat juga warga dari luar Jelambar yang menggunakan fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar, khususnya pada Sekolah tingkat menengah (SMP – SMA). Padahal, menurut Standar DKI dan PU, seharusnya pengguna fasilitas pendidikan (siswa) bertempat tinggal di sekitar sekolah tersebut- agar terjadi produktivitas yang lebih baik (tidak harus menempuh perjalanan jauh), dan mengurangi *traffic* perjalanan di wilayah perkotaan. Hal ini tentunya didorong oleh faktor-faktor tertentu yang selanjutnya akan diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian ini, akan difokuskan pada fasilitas pendidikan tingkat menengah yaitu SMP dan SMA, dengan pertimbangan bahwa usia SMP dan SMA sudah memiliki preferensi sendiri dalam menentukan atau memilih fasilitas pendidikan yang akan digunakan, dibandingkan dengan usia TK – SD yang lebih kepada preferensi orang tua dalam memilih fasilitas pendidikan - dikaitkan dengan Standar Penyediaan Fasilitas oleh SNI dan Perda DKI no. 6 tahun 1999; dijelaskan pada SNI bahwa tiap tingkat sekolah memiliki jangkauan pelayanan dan diharapkan siswa yang menggunakan sekolah tersebut bertempat tinggal pada radius tersebut, dan menurut Perda DKI 6 tahun 1999 tiap sekolah memiliki standar dukungan penduduk di suatu wilayah, diharapkan wilayah tersebut terlayani dari sisi jumlah penduduk dan jumlah sekolah.

Maka dari itu, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penggunaan fasilitas pendidikan yang berada di Kelurahan Jelambar? Mengapa terjadi pola penggunaan fasilitas seperti pada kondisi eksisting?
2. Bagaimana preferensi dan persepsi pengguna fasilitas pendidikan tingkat menengah di Kelurahan Jelambar baik warga Jelambar maupun warga di luar Jelambar?

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penggunaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan fasilitas pendidikan tersebut. Dikaitkan dengan asumsi standar penyediaan fasilitas pendidikan di Jakarta dengan penggunaannya di Kelurahan Jelambar.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yang mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi langsung ke lapangan atau lokasi studi. Peneliti hadir, berpikir dan menentukan nilai. Dengan tujuan untuk menggali data dan informasi tentang topik mengenai penggunaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar. Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai kesesuaian penyediaan fasilitas pendidikan, pola penggunaan fasilitas pendidikan, dan preferensi penggunaan fasilitas pendidikan.

Pembahasan kesesuaian tersebut yaitu dengan mengacu kepada tabel standar penyediaan fasilitas pendidikan menurut SNI dan Perda DKI no 6 tahun 1999, seperti pada berikut ini

Tabel 1. Standar Penyediaan Fasilitas Pendidikan

No	Jenis Sarana	SNI 03-1733-2004				Perda DKI No. 6 tahun 1999			
		Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Satuan per Sarana		Ra-dius (m)	Jumlah Penduduk Pendukung	Kebutuhan Satuan per Sarana		Ra-dius (m)
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)	
1	TK	1.250	216	500	500	1.250	170	500	-
2	SD	1.600	633	2.000	1.000	2.500	1.100	3.000	-
3	SMP	4.800	2.282	9.000	1.000	15.000	2.900	4.000	-
4	SMA	4.800	3.835	12.500	3.000	30.000	3.000	4.800	-
5	Taman Bacaan	2.500	72	150	1.000	-	-	-	-

Sumber: SNI 03-1733-2004 dan Perda DKI 6 thn 1999

Sedangkan untuk pembahasan berikutnya diperlukan dua jenis sampel yang berbeda yaitu sampel sekolah dan sampel responden pengguna fasilitas pendidikan tersebut.

1. Sampel Sekolah

Untuk menentukan jumlah sekolah yang di teliti, maka digunakan simple random sampling. Menurut Kerlinger (2006:188), *simple random sampling* adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau semesta tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil.

Selain itu, batasan pengambilan sampel sekolah yaitu diarahkan kepada sekolah tingkat menengah (SMP dan SMA) dikarenakan akan lebih relevan dalam penelitian ini; yaitu dari sisi usia pengguna yang sudah lebih memiliki preferensi sendiri dalam menentukan pilihan fasilitas pendidikan.

Tabel 2. Sampel Sekolah yang Diteliti

No	Nama Sekolah	Kepemilikan	Agama	Akreditasi
1	SMPN 83	Negeri	Umum	B
2	SMP Hati Kudus	Swasta	Katolik	A
3	SMP Kristoforus 1	Swasta	Katolik	A
4	SMA Dharma Jaya	Swasta	Katolik	A
5	SMA Kristoforus 1	Swasta	Katolik	A
6	SMK Bhara Trihora 1	Swasta	Umum	A

Sumber: Olahan Penulis dari Survey Lapangan dan Sekunder, 2016

2. Sampel Responden

Dalam menyebarkan kuesioner, perlu diketahui jumlah batas minimal kuesioner agar data yang diperoleh dapat digunakan dalam analisis sebagai data yang valid. Metode pengambilan sample dilakukan menggunakan metode *Cluster Sampling*. Metode ini diambil karena pemilihan mengacu pada pengguna / siswa di sekolah tersebut.

Berikut cara menghitung pengambilan sampel.

$$\text{Rumus} = n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan : n = Jumlah Sampel
N = Jumlah populasi

- Hati Kudus = 30 kuesioner
- SMP Kristoforus 1 = 30 kuesioner
- SMA Dharma Jaya = 30 kuesioner
- SMA Kristoforus 1 = 30 kuesioner
- SMK Bhara Trikora 1 = 30 kuesioner
- TOTAL = 180 kuesioner

Tabel 3. Faktor Pemilihan Fasilitas Pendidikan

No	Kriteria	Ukuran
1	Aksesibilitas	A. Kemudahan akses menuju sekolah
		B. Ketersediaan transportasi publik
2	Lokasi	A. Kedekatan pencapaian dari tempat tinggal
		B. Berada di wilayah Kelurahan yang sama dengan tempat tinggal
3	Kualitas	A. Kualitas fisik bangunan
		B. Kualitas guru dan pengajaran
		C. Ketersediaan fasilitas
		D. Citra / Reputasi Sekolah
4	Sosial	A. Basis agama sekolah
		B. Kesamaan etnis/ ras antar siswa
		C. Relasi keluarga/ tradisi keluarga
5	Ekonomi	A. Biaya transportasi
		B. Biaya sekolah
6	Kepemilikan	A. Negeri / Swasta

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2016

Metode yang digunakan adalah Likert dan Relative Rank Index. Skala likert menurut Sugiyono (2011:93) adalah sebagai berikut: "Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Untuk pilihan jawaban diberi skor, maka responden harus menggambarkan, mendukung pernyataan (item positif) atau tidak mendukung pernyataan (item negatif). Relative Rank Index yaitu analisis yang bertujuan untuk melihat variabel-variabel faktor apa saja yang paling dominan yang berpengaruh pada tingkat kepentingan dan preferensi pemilihan untuk menggunakan fasilitas pendidikan / sekolah. Analisis dilakukan dengan mengurutkan setiap sub faktor pemilihan fasilitas pendidikan dari nilai paling tinggi hingga paling rendah. Nilai yang tinggi menandakan faktor tersebut penting bagi siswa/ pengguna untuk memilih dan menggunakan fasilitas pendidikan tersebut.

3. MATERI, HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Standar Penyediaan Fasilitas

Standar penyediaan fasilitas pendidikan / sekolah yang menjadi acuan penulis pada penelitian ini adalah SNI 03-1733-2004 (acuan terhadap Ditjen Cipta Karya PU 1987) dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang DKI Jakarta. Tabel Standar Penyediaan tersebut mengandung elemen yaitu jumlah penduduk pendukung, luas sarana, radius pelayanan, dan acuan lokasi fasilitas pendidikan. Standar ini tidak menjabarkan standar kualitas sekolah, jenis dan basis agama sekolah, dan kelas sekolah sehingga menurut standar ini semua sekolah baik yang telah ada atau yang akan direncanakan dianggap sama dan setara.

Kesesuaian dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan Radius Pelayanan, Lokasi dan Aksesibilitas; kemudian dibagi lagi berdasarkan tingkatan pendidikan SMP, dan SMA sesuai dengan ruang lingkup :

A. Tingkat SMP

Tabel 4. Kesesuaian Berdasarkan Jumlah Penduduk Tingkat SMP

Tingkat Sekolah	Jumlah Penduduk Pendukung	Jumlah Penduduk Lapangan	Jumlah SMP Eksisting	Jumlah SMP menurut Standar	Kesesuaian
SMP	15.000	34.909	6	2	4

Sumber: Olahan Penulis dari Standar Perda DKI 6 thn 1999, 2016

Terdapat surplus kebutuhan (*over supply*) SMP sejumlah empat (4) unit di wilayah Jelambar. Sehingga dengan jumlah unit SMP yang berlebih, maka masyarakat Jelambar dan sekitarnya memiliki banyak pilihan untuk menggunakan fasilitas pendidikan.

Menurut Standar Penyediaan Fasilitas oleh Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1999, radius pencapaian untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama adalah 1.000 meter, sama dengan radius pelayanan SD. Hanya saja, tidak ditentukan secara spesifik lokasinya. Dari hasil observasi terlihat bahwa seluruh Kelurahan Jelambar sudah terlayani oleh fasilitas pendidikan SMP pada radius 400m. Lebih jauh lagi, jangkauan pelayanan fasilitas SMP di Jelambar juga melayani hampir keseluruhan wilayah Kelurahan di sekitarnya antara lain Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, Grogol, dan Tanjung Duren Utara. Dengan jumlah unit SMP yang lebih sedikit dari pada SD, maka terlihat bahwa jangkauan pelayanan seluruh SMP di Jelambar tidak seluas jangkauan SD dikarenakan standar jangkauan pelayanan yang sama yaitu 1.000 m. Dalam SNI, dikatakan bahwa lokasi tidak harus berada di tengah kelompok warga, sehingga peraturan mengenai lokasi SMP tidak spesifik. Sedangkan untuk aksesibilitas, dikatakan bahwa lokasi SMP harus mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Oleh sebab itu, penulis menggunakan toleransi ± 500 meter dari angkutan umum terdekat. Hal ini mengacu kepada *Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA)*¹ yang mengatakan bahwa jarak berjalan kaki dari kendaraan umum untuk kawasan sedang-padat adalah 1/8 – 1/4 mil atau 200 – 400 meter ~ dibulatkan menjadi 500 meter.

¹ TOD Guidelines, *Greater Cleveland Regional Transit Authority*, 2007

B. Tingkat SMA

Tabel 5. Kesesuaian Berdasar Jumlah Penduduk Tingkat SMA

Tingkat Sekolah	Jumlah Penduduk Pendukung	Jumlah Penduduk Lapangan	Jumlah SMA Eksisting	Jumlah SMA menurut Standar	Kesesuaian
SMA	30.000	34.909	4	1	3

Sumber: Olahan Penulis dari Standar Perda DKI 6 thn 1999, 2016

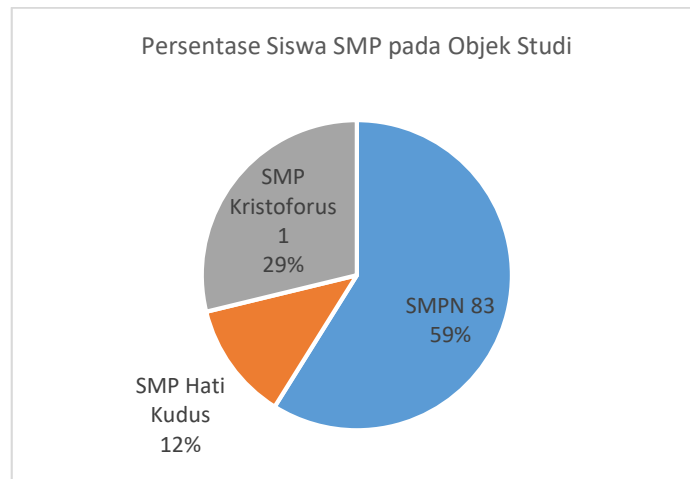
Terdapat surplus kebutuhan (*over supply*) SMA sejumlah tiga (3) unit di wilayah Jelambar. Sehingga dengan jumlah unit SMP yang berlebih, maka masyarakat Jelambar dan sekitarnya memiliki banyak pilihan untuk menggunakan fasilitas pendidikan.

Menurut Standar Penyediaan Fasilitas oleh Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1999, radius pencapaian untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah mencapai 3.000 meter. Sehingga untuk tingkat SMA memiliki radius pelayanan yang cukup luas; yaitu Kelurahan Jelambar sendiri sudah terlayani oleh sejumlah fasilitas pendidikan tingkat SMA serta mencakup wilayah antara lain Kelurahan Wijaya Kusuma, Jelambar Baru, Grogol, Tomang, Tanjung Duren Utara, Tanjung Duren Selatan, Kedaung Kali Angke, Duri Kepa, Jembatan Besi, Angke, Jembatan Lima, Jatipulo, Cideng, dan Kedoya Utara. Dalam SNI, dikatakan bahwa lokasi SMA tidak harus berada di tengah kelompok warga, sehingga peraturan mengenai lokasi SMA tidak spesifik. Sedangkan untuk aksesibilitas, dikatakan bahwa lokasi SMA harus mudah dijangkau dengan kendaraan umum. Oleh sebab itu, penulis menggunakan toleransi ± 500 meter dari angkutan umum terdekat. Hal ini mengacu kepada *Greater Cleveland Regional Transit Authority (RTA)*² yang mengatakan bahwa jarak berjalan kaki dari kendaraan umum untuk kawasan sedang-padat adalah 1/8 – 1/4 mil atau 200 – 400 meter ~ dibulatkan menjadi 500 meter. Dari hasil analisis, terjadi ketidaksesuaian pada SMA Dharma Jaya dan SMK Bhara Trikora karena lokasinya terlampaui jauh dari kendaraan umum terdekat sehingga kurang memenuhi aspek dari SNI, sama seperti unit SMP, dikarenakan SMP dan SMA/K dari sekolah tersebut merupakan satu kesatuan kompleks sekolah. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pencapaian siswa sehingga siswa akan lebih menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai fasilitas pendidikannya.

2. Pola Penggunaan Fasilitas Pendidikan di Jelambar

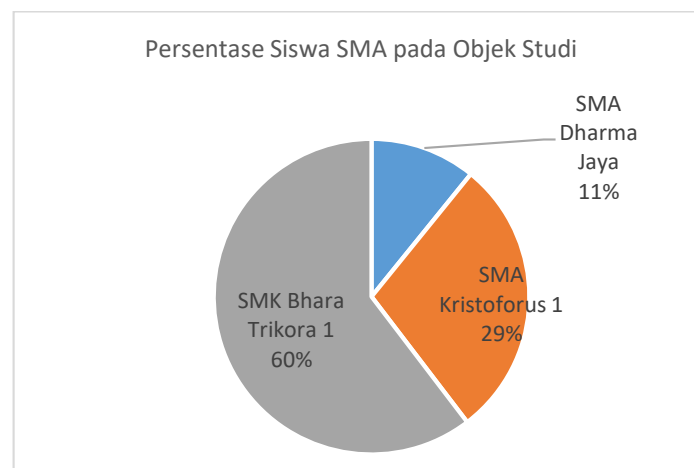
Pada pola penggunaan fasilitas pendidikan akan dibahas mengenai persentase siswa pada objek studi, agama siswa, serta jarak dari tempat tinggal siswa ke wilayah Jelambar. SMPN 83 dan SMK Bhara Trikora memiliki jumlah siswa yang paling banyak dibandingkan lainnya. Sehingga menunjukkan ada pengelompokan siswa beserta faktor pemilihan fasilitas pendidikan serta dipengaruhi oleh kondisi eksisting Fasilitas Pendidikan tersebut. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

² TOD Guidelines, *Greater Cleveland Regional Transit Authority*, 2007



Gambar 1. Persentase Siswa SMP pada Objek Studi

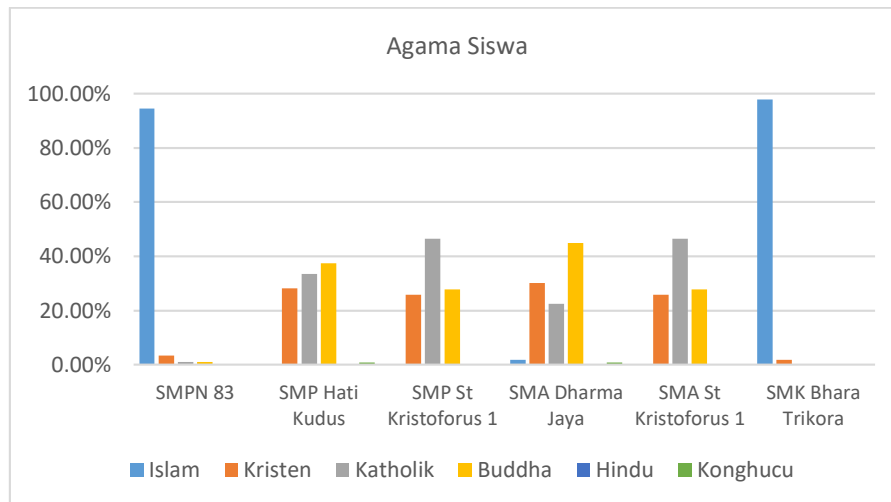
Sumber: Olahan Penulis dari Data Siswa, 2016



Gambar 2. Persentase Siswa SMA pada Objek Studi

Sumber: Olahan Penulis dari Data Siswa, 2016

Fasilitas Pendidikan di Jelambar terbagi atas Sekolah Berbasis Agama dan Sekolah Umum, dan terjadi segregasi penggunaan fasilitas pendidikan. terdapat perbedaan pola penggunaan dan jenis agama pada tiap-tiap sekolah yang diteliti. Terlihat bahwa SMPN 83 dan SMK Bhara Trikora sebagai Sekolah Umum, sangat didominasi oleh siswa dari beragama Islam, meskipun sebagian kecil beragama Non Islam. Sedangkan, pada kasus SMP Hati Kudus dan SMA Dharma Jaya, meskipun menyandang sebagai Sekolah Berbasis agama Katolik, namun nyatanya siswa beragama Buddha memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan agama lain termasuk Katolik sehingga terjadi anomali antara identitas sekolah dengan pengguna fasilitasnya. Namun pada temuan ini, dapat diindikasikan bahwa basis agama pada suatu sekolah tidak terlalu berpengaruh dalam pemilihan fasilitas pendidikan bagi yang beragama selain basis agama sekolah tersebut. Pada SMP – SMA St Kristoforus 1, persentase siswa beragama Katolik menjadi paling dominan dibandingkan dengan agama lain sehingga identitas sekolah dengan penggunaannya masih sesuai. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.



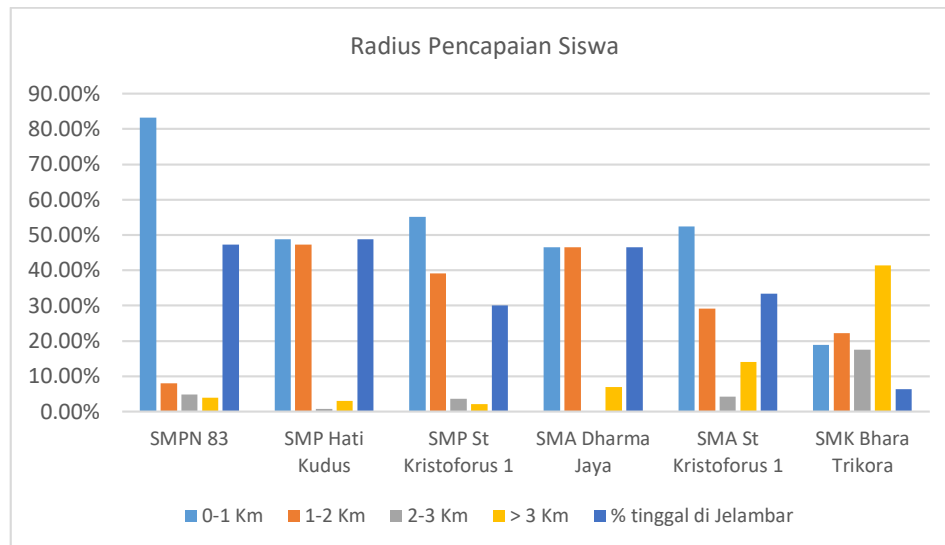
Gambar 3. Agama Siswa Pada Beberapa Fasilitas Pendidikan di Jelambar
Sumber: Olahan Penulis dari Data Siswa, 2016

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 dijelaskan bahwa Fasilitas Pendidikan tingkat SMP memiliki jangkauan / radius pelayanan 1.000 meter dan tingkat SMA memiliki jangkauan/ radius pelayanan 3.000 meter. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semestinya siswa / pengguna suatu fasilitas pendidikan berada dalam jangkauan tersebut, dengan harapan terjadi efisiensi waktu serta efektivitas pada siswa yang bersangkutan.

Dari diagram di bawah, dapat terlihat bahwa pengguna fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar didominasi pada radius pencapaian 0-1 Km. Radius pencapaian 0-1 Km meliputi wilayah Kelurahan Jelambar, Wijaya Kusuma, Tanjung Duren Utara, dan Grogol yang merupakan wilayah administratif yang berbatasan langsung dengan Jelambar. Serta pola penggunaan tersebut sebagian besar masih sesuai dengan Standar SNI mengenai radius pelayanan sekolah.

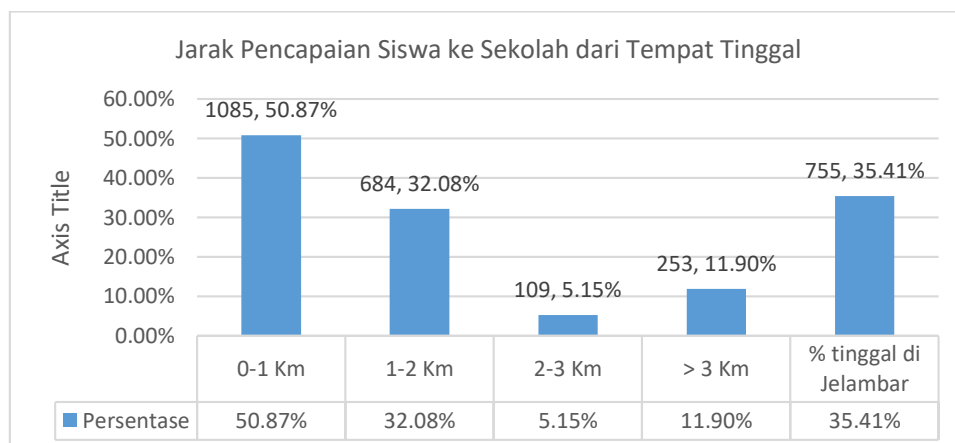
Terdapat perbedaan pola penggunaan pada SMK Bhara Trikora, yaitu penggunaannya didominasi oleh yang bertempat tinggal cukup jauh, yaitu > 3 Km. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh kekhasan SMK Bhara Trikora yaitu adanya jurusan/ kejuruan yang jarang sekali dimiliki oleh Sekolah Reguler, yaitu Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Audio Visual, Akuntansi, dan Pemasaran. Sehingga ada indikasi bahwa faktor lokasi/ pencapaian tidak begitu berpengaruh bagi pemilihan fasilitas sekolah untuk kasus tertentu.

Selanjutnya, grafik hasil rekapitulasi jumlah dan persentase siswa pada seluruh sampel sekolah berdasarkan jarak pencapaian siswa dari sekolah ke tempat tinggal, dan jumlah yang tinggal di Kelurahan Jelambar sendiri. Dilihat dari grafik pada Gambar 5, dari 2.133 siswa, mayoritas (50,87%) siswa bertempat tinggal dekat dengan sekolah mereka, sehingga hal ini mencerminkan efektifitas siswa dalam hal aksesibilitas. Namun memang dalam radius 1 Km tersebut tidak seluruhnya masih berada di kawasan Jelambar, sehingga hanya 35.41% siswa yang bertempat tinggal juga di dalam Kelurahan Jelambar.



Gambar 4. Radius Pencapaian Siswa dari Tempat Tinggal pada Beberapa Fasilitas Pendidikan di Jelambar

Sumber: Olahan Penulis dari Data Siswa, 2016



Gambar 5. Rekapitulasi Jarak Radius Pencapaian Siswa dari Tempat Tinggal pada Beberapa Fasilitas Pendidikan di Jelambar

Sumber: Olahan Penulis dari Data Siswa, 2016

3. Preferensi Pengguna Fasilitas Pendidikan di Jelambar

Preferensi pengguna dihasilkan dari penyebaran ke enam unit sekolah dengan masing-masing 30 kuesioner. Berdasarkan perhitungan skala likert dari hasil kuesioner, maka didapatkan nilai-nilai seperti pada Tabel 6.

Berdasarkan perhitungan skala *Likert* dari hasil kuesioner, maka akan terlihat bagaimana faktor dominan dari pemilihan / penggunaan fasilitas pendidikan di Jelambar, yaitu dengan melakukan *Relative Rank Index* (RRI), yaitu diurutkan dari nilai index tertinggi ke nilai index terendah, yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Dari Tabel 7 dan Tabel 8, maka terlihat faktor dominan dalam pemilihan Fasilitas Pendidikan di Jelambar adalah sub faktor Kualitas dan Pengajaran (3B), disusul oleh Citra/ Reputasi Sekolah (3D), Biaya SPP (5B), Ketersediaan fasilitas (3C), dan Kepemilikan Sekolah (6).

Sedangkan sub faktor paling tidak dominan adalah Faktor Sosial (4) yaitu sub faktor Adanya relasi / tradisi keluarga (4C).

Tabel 6. Perhitungan *Likert* Hasil Kuesioner

No Fakt or	Sub Faktor	SMPN 83	SMP Hati Kudus	SMP St Kristo-forus 1	SMA Dhar-ma Jaya	SMA St Kristo-forus 1	SMK Bhara Triko-ra
1A	Kemudahan akses menuju sekolah	03.53	0,17361 11	03.57	03.23	03.20	0,17152 78
1B	Ketersediaan transportasi publik	03.57	0,13402 78	0,13888 89	0,13194 44	0,14583 33	03.37
2A	Kedekatan pencapaian dari tempat tinggal	0,18263 89	0,14791 67	03.00	03.40	03.03	02.40
2B	Berada di wilayah kelurahan yang sama dengan tempat tinggal	0,14097 22	02.40	02.57	03.27	0,14375	02.53
3A	Kualitas fisik bangunan	03.13	03.47	0,17361 11	03.33	03.53	03.57
3B	Kualitas guru dan pengajaran	0,18055 56	0,18541 67	0,1875	0,18055 56	0,16875	0,17569 44
3C	Ketersediaan fasilitas	03.13	03.47	0,17361 11	03.57	0,17152 78	0,17361 11
3D	Citra/ Reputasi Sekolah	03.30	0,17152 78	0,18263 89	03.57	0,17569 44	0,17847 22
4A	Basis Agama Sekolah	02.37	0,15069 44	03.40	03.07	03.53	02.07
4B	Kesamaan Ras / Etnis	0,12708 33	03.07	03.17	03.10	03.40	02.10
4C	Adanya relasi / tradisi keluarga	02.20	02.10	02.33	02.37	02.17	0,10416 67
5A	Biaya transportasi ke sekolah	03.30	03.23	03.03	03.17	03.37	03.27
5B	Biaya SPP	0,18541 67	03.53	03.10	0,16875	03.50	0,17569 44
6	Negeri/ Swasta	0,19236 11	0,17361 11	0,18055 56	03.37	03.53	0,13888 89

Sumber: Olahan Penulis dari Kuesioner, 2016

4. Tinjauan Standar Penyediaan Fasilitas

Berdasarkan tabel 5.1, Standar Penyediaan Fasilitas Pendidikan hanya berbicara seputar jumlah penduduk dan jumlah fasilitas pendidikan, yaitu rasio / perbandingan antara jumlah fasilitas pendidikan dan jumlah penduduk serta jarak pelayanan fasilitas penduduk tersebut. Serta tidak ada lagi elemen dan faktor lainnya yang disinggung pada standar penyediaan fasilitas pendidikan tersebut; meskipun menurut sumber Ditjen PU, bahwa ada pertimbangan tertentu seperti sosial penduduk, namun pada tabel standar hal itu tidak terdeskripsikan secara jelas.

Jika dilihat pada analisis di atas, bahwa pola penggunaan fasilitas pendidikan ternyata dipengaruhi oleh faktor lain sehingga menjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan standar penyediaan fasilitas pendidikan eksisting. Standar tersebut menyatakan bahwa tiap unit sekolah memiliki jangkauan pelayanan pada jarak tertentu, tetapi pada kondisi eksisting terdapat sedikit banyak asal siswa yang melebihi jangkauan pelayanan tersebut. Lalu terdapat perbedaan ‘kelas’ sekolah yang tercermin dari biaya SPP per bulan yang mengakibatkan ada pengelompokan skala ekonomi pada sekolah tertentu meskipun tidak ada penjelasan yang lebih rinci pada penelitian ini, terdapat pula sekolah berbasis agama yang juga menyebabkan adanya pengelompokan atau segregasi siswa berdasarkan agama.

Standar penyediaan fasilitas yang telah ada menganggap seolah-olah tiap sekolah yang ada atau yang akan ada (jika sebagai acuan) adalah SETARA, yaitu tidak ada perbedaan kelas, perbedaan kualitas, dan perbedaan basis agama. Sehingga jika diterapkan pada kondisi saat ini, standar tersebut menjadi kurang relevan yang nantinya menyebabkan penyimpangan penggunaan fasilitas pendidikan; yaitu tidak semua warga lokal yang menjadi pengguna sekolah, dan sebaliknya, terdapat siswa dari radius pencapaian yang cukup jauh menjadi pengguna fasilitas pendidikan di Jelambar.

Standar Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Jelambar tentunya harus ditinjau ulang oleh pemangku kebijakan dengan mengikuti perkembangan dinamika perkotaan saat ini terutama Jakarta, terkait dengan hasil penelitian dan penjelasan di atas. Bahwa standar penyediaan yang hanya terpaku pada rasio penduduk sudah kurang relevan, harus ada elemen-elemen sekunder dan tersier yang menyangkut sosial-ekonomi penduduk seperti agama, tingkat ekonomi, kualitas sekolah, dan lain sebagainya.

Tabel 7. Perbandingan dan Ranking RRI dari 6 Sekolah di Jelambar

Rank	SMPN 83	SMP Hati Kudus	SMP St Kristo- forus 1	SMA Dharma Jaya	SMA St Kristo- forus 1	SMK Bhara Trikora
1	6	3B	3B	3B	3D	3D
2	5B	1A	3D	5B	3C	3B
3	2A	6	6	3C	3B	5B
4	3B	3D	3A	3D	3A	3C
5	1B	5B	3C	2A	4A	1A
6	1A	3A	1A	6	6	3A
7	3D	3C	4A	3A	5B	1B
8	5A	5A	4B	2B	4B	5A
9	3A	4B	5B	1A	5A	6
10	3C	4A	5A	5A	1A	2B
11	2B	2A	2A	4B	2A	2A
12	4B	1B	1B	4A	1B	4B
13	4A	2B	2B	1B	2B	4A
14	4C	4C	4C	4C	4C	4C

Sumber: Olahan Penulis dari Kuesioner, 2016

Tabel 8. Rata-rata RRI dari 6 Sekolah di Jelambar

No	Sub Faktor	Rata-rata	Rank
3B	Kualitas guru dan pengajaran	0,1798611	1
3D	Citra/ Reputasi Sekolah	0,1694444	2
5B	Biaya SPP	03.56	3
3C	Ketersediaan fasilitas	03.54	4
6	Negeri/ Swasta	03.53	5
1A	Kemudahan Akses	03.48	6
3A	Kualitas fisik bangunan	03.46	7
5A	Biaya transportasi ke sekolah	03.23	8
2A	Kedekatan pencapaian dari tempat tinggal	03.10	9
1B	Ketersediaan transportasi publik	03.01	10
4B	Kesamaan Ras / Etnis	0,1465278	11
4A	Basis Agama Sekolah	0,1458333	12
2B	Berada di wilayah tempat tinggal	0,1347222	13
4C	Adanya relasi / tradisi keluarga	02.18	14

Sumber: Olahan Penulis dari Kuesioner, 2016

KESIMPULAN

Dari hasil penjelasan dan analisis pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

Penggunaan fasilitas pendidikan tentunya dipengaruhi oleh kondisi penyediaannya sehingga kondisi tersebut perlu diperhatikan. Penyediaan fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar secara umum sudah sesuai dengan standar yang ditentukan, yaitu SNI 03-1733-2004 dan Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1999; sedangkan dalam konteks lokasi terhadap transportasi publik (unit Sekolah Dharma Jaya dan Bhara Trikora) hal ini tentunya dapat menjadi bahan evaluasi terhadap lokasi sekolah. Secara jangkauan pelayanan, Kelurahan Jelambar sudah terlayani oleh seluruh jenis sekolah; bahkan cenderung *over supply*.

Pola penggunaan fasilitas pendidikan di Jelambar yang paling dominan adalah adanya pengelompokan agama tertentu pada sekolah tertentu berdasarkan enam (6) sampel sekolah yang diambil yaitu siswa beragama Islam cenderung bersekolah di Sekolah Non Agama (baik Negeri maupun Swasta), sedangkan siswa beragama Kristen, Katholik, dan Buddha cenderung bersekolah di Sekolah Swasta Berbasis Agama meskipun agama siswa tidak sama dengan basis agama sekolah tersebut – jika dikaitkan dengan preferensi siswa, faktor dominan Kesamaan Ras/ Etnis seluruhnya berada di skor > 3 yaitu Penting dan Tidak Penting. Sehingga ada kecenderungan bahwa memang siswa di sekolah berbasis agama tersebut lebih ingin bersekolah di lingkungan yang beretnis sama. Berdasarkan observasi lapangan, mayoritas ras di Sekolah berbasis agama merupakan ras Tionghoa. Selain itu, dari sisi Radius Pencapaian, sebagian besar sekolah memiliki siswa dengan radius pencapaian < 1 Km - kecuali SMK Bhara Trikora. Hal ini sesuai dengan SNI bahwa radius pelayanan SMP adalah hingga 1 Km, dan SMA hingga 3 Km. Khusus SMK Bhara Trikora, ini disebabkan adanya kekhasan dari sekolah tersebut karena menyediakan jurusan yang tak dimiliki oleh sekolah umum, sehingga penggunaanya tidak terpengaruh oleh jarak pencapaian ke sekolah demi kualitas dan jenis pengajaran yang dipilih; tetapi tidak terlepas pula dari biaya SPP yang cukup rendah dibandingkan dengan Sekolah Swasta lainnya.

Persebaran jumlah siswa di enam sampel sekolah juga terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Sekolah Non Agama baik Negeri maupun Swasta memiliki siswa jauh lebih banyak daripada Sekolah Berbasis Agama. Kondisi ini juga terkait dengan kelas sekolah di Kelurahan Jelambar. Dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, bahwa untuk Sekolah Swasta Berbasis Agama (Dharma Jaya dan Kristoforus) memiliki biaya SPP yang cukup tinggi (Rp 500.000 – Rp 950.000 per bulan) dibandingkan dengan Sekolah Swasta Non Agama (Bhara Trikora, Rp 230.000 per bulan), bahkan Sekolah Negeri (SMPN 83) membebaskan biaya SPP bagi siswanya. Jika dikaitkan dengan hasil kuesioner, faktor Biaya SPP memiliki tingkat Skor yang cukup tinggi di enam sekolah tersebut yaitu > 3 . Meskipun biaya SPP pada tiap – tiap sekolah berbeda, namun dengan hasil *likert* yang cukup tinggi dan hampir sama sehingga cukup menandakan kemampuan dan tingkat ekonomi siswa (dan orang tuanya) dalam membiayai sekolah, dan cukup mencerminkan bahwa tingkat ekonomi siswa yang bersekolah di Sekolah Non Agama cenderung lebih rendah daripada Sekolah Berbasis Agama. Sehingga kecenderungan pemilihan Sekolah berbasis agama atau tidak berbasis agama juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Namun faktor tersebut tidak dibahas lebih jauh pada penelitian ini sehingga perlu observasi lanjutan untuk membuktikan hal tersebut secara lebih konkrit.

Dari hasil penyebaran kuesioner, maka terlihat bahwa faktor dominan yang mempengaruhi pemilihan untuk menggunakan fasilitas pendidikan di Kelurahan Jelambar adalah sub faktor Kualitas dan Pengajaran (3B), disusul oleh Citra/ Reputasi Sekolah (3D), Biaya SPP (5B), Ketersediaan fasilitas (3C), dan Kepemilikan Sekolah (6). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Jelambar sudah memenuhi sub faktor tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. (n.d.).
- Ariola, M. (2006). *Principles and Methods of Reserach*. Manila: Rex Book Store Inc.
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). SNI 03-1733-2004. *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan*.
- Barkan, S. (2012). *Sociology: A Comprehensive Edition*.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in Third World*. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Ikatan Ahli Perencanaan. (1998). *Kamus Tata Ruang*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Doxiadis. (1971). *Ecology and Ekistics*. California: Elex.
- Fitria, D. F. (2011). Skripsi. *Identifikasi Pola Pemanfaatan Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan Terencana (Studi Kasus: Dasana Indah, Medang Lestari, Vila Ilhami)*.
- Fowler, L. A. (2008). *Instructor's Manual for Henslin - Essentials of Sociology; a Down-to-earth Approach*. Oxford: Paperback.

- Hermanislamet. (1993). Desentralisasi Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah. *Jurnal Forum Perencanaan Pembangunan Vol 1. No 2*. Yogyakarta: Puslit Perencanaan Pembangunan Nasional UGM.
- Kaiser, E. J., Godschalk, D. R., & Chapin, F. (1995). Urban Land Use Planning. Illinois: University of Illinois Press.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (1999). Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 tahun 1999. *Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta*. DKI Jakarta.
- Septhevian, R. (2014). Tesis. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Orangtua Dalam Memilih Sekolah Dasar (Studi Kasus: Kota Yogyakarta)*.
- Subagya, K. (2006). Tesis. *Evaluasi Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan pada Lingkungan Perumahan Menengah ke Bawah di BSD*.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syani, A. (2012). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang Undang No 11 Tahun 2011 (Perumahan dan Kawasan Permukiman). (n.d.).
- Wilkie, W. L. (1994). *Customer Behavior (Third Edition)*. New York: Jhon Wiley Sons, inc.